

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dinamika tata kelola BUMDes merupakan faktor penting dalam upaya memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini mempelajari berbagai kajian terdahulu, meliputi skripsi, tesis, jurnal, dan laporan penelitian, yang menggunakan beragam metode, konsep, dan fungsi BUMDes dalam meningkatkan kemakmuran warga desa. Tinjauan ini bertujuan guna memperoleh landasan teoritis dan praktis yang kuat dalam menganalisis dinamika tata kelola BUMDes Manjung Makmur dan kontribusinya terhadap penguatan ekonomi lokal di Desa Manjung.

Kajian sebelumnya dalam Dinamika Tata Kelola BUMDES Manjung Makmur Dalam Memperkuat Ekonomi Lokal di Desa Manjung, Kecamatan Panekan. Peneliti melihat kembali temuan penelitian sebelumnya mengenai berbagai konsep pengelolaan BUMDesa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, lebih banyak penelitian menekankan peran BUMDesa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Berikut adalah beberapa studi yang dilakukan oleh para peneliti:

Kajian oleh (Hetami, 2022). Berjudul “Memperkuat pemahaman tentang pengelolaan bumdes untuk memaksimalkan potensi Desa Persik Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kajian ini” . Diperoleh hasil, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial pengurus POKDARWIS dan pengelola BUMDes dalam mengembangkan potensi desa. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa yang memiliki pengelolaan BUMDes yang baik mampu mengintegrasikan sumber daya lokal menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan, khususnya pada sektor pariwisata.

Kajian oleh (Indrawati, 2021). Berjudul “Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa Wisata Ngargogondo Borobudur dengan Meningkatkan Fungsi Manajemen BUMdes”. Diperoleh hasil penelitian, bahwa pentingnya pengelolaan manajemen BUMDes yang terstruktur untuk mendukung potensi ekonomi desa wisata. Penelitian ini mencoba meningkatkan motivasi dan komitmen pengelola BUMDes Ngargomukti dengan menggunakan metod dengan diskusi fokus grup (FGD). Penelitian ini juga menyoroiti bahwa kerja sama antara pengelola BUMDes

dengan perangkat desa menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan usaha.

Kajian oleh (NurdiyantiR, 2021). Penelitian dengan judul " Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Penguatan Ekonomi Masyarakat di Desa Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur". Menemukan bahwa BUMDes di desa menyediakan Simpan pinjam, membuat batako, dan menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat adalah beberapa bisnisnya. Ada saat-saat ketika unit usaha ini melakukan tugasnya dengan cepat, meskipun kinerjanya cukup baik. Selain itu, Seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian, operasi BUMDes belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha BUMDes ini. Kendala tersebut antara lain adalah kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan usaha BUMDes, serta manajemen pengelolaan yang dinilai belum maksimal. Masalah ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas pengelola dan keterlibatan masyarakat agar BUMDes dapat berjalan lebih optimal.

Kajian oleh (Kristiana Reinildis Aek, 2022). Berjudul "Di Desa Wolonwalu, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Pengelolaan serta kontribusi BUMDes Melati Dewa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat." Diperoleh hasil penelitian, menunjukkan bahwa BUMDes Melati Dewa sudah menjalankan beberapa unit usaha, seperti simpan pinjam, sewa alat pertanian, fotokopi, ATK, BRILink, dan mobil tangki air. Akan tetapi, meskipun usaha-usaha ini sudah berjalan, kinerja BUMDes masih belum berpengaruh besar pada perekonomian masyarakat. Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja di desa, dan mengembangkan usaha masyarakat belum sesuai dengan harapan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BUMDes Melati Dewa belum berfungsi sebagai wadah atau fasilitator yang dapat memanfaatkan potensi unggulan Desa Wolonwalu untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Kajian oleh (Abdul, 2021). Penelitian dengan topik " Peran Efektif BUMDes dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Warga Desa" menemukan hasil yang bertujuan untuk mengetahui seberapa baik BUMDes memberdayakan masyarakat desa dan bagaimana konsep pengelolaan programnya dalam

mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran BUMDes Wringintelu turut berkontribusi dalam mendukung pelayanan masyarakat, termasuk menjalankan program-program pemberdayaan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial. Meski program yang ada cukup bermanfaat, penelitian ini juga mengungkap bahwa masih diperlukan peningkatan dalam aspek pengelolaan agar BUMDes dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan sebagai lembaga ekonomi desa.

Kajian oleh (Cahyadi & Sulthon Basyari, 2023). Berjudul “Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan data yang dihimpun melalui kegiatan observasi. Strategi penguatan BUMDes dilakukan melalui pemanfaatan lahan milik desa secara optimal sebagai langkah dalam meningkatkan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Karya Muda telah mengelola aset desa secara cukup efektif, sehingga tujuannya adalah untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan penghasilan dari unit-unit usaha yang dijalankan. Salah satu aktivitas penting yang dilakukan adalah pelaporan keuangan secara rutin sebagai bentuk tanggung jawab kepada Pemerintah Desa.

Kajian oleh (Eva Yunita & Ade Yunita Mafruhah, 2022). Berjudul “Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa BUMDes BIMA memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, manajemennya berfokus pada pelayanan masyarakat. Kedua, adanya upaya memanfaatkan potensi kerajinan tangan dari sampah plastik yang diolah menjadi produk bernilai seperti aksesoris rumah tangga. Ketiga, BUMDes ini rutin mengadakan penyuluhan untuk mendukung UMKM di bidang kewirausahaan. Keempat, terdapat program unggulan yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat untuk kepentingan umum. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap tiga peluang yang dimiliki oleh BUMDes BIMA. Pertama, dukungan pemerintah berupa bantuan dana serta keterlibatan modal dari masyarakat yang diarahkan untuk kepentingan bersama. Kedua, adanya kerjasama dengan pihak eksternal untuk menciptakan unit usaha berbasis inovasi masyarakat. Ketiga, peningkatan literasi digital dan adaptasi teknologi dalam perdagangan daring sesuai kebutuhan era Revolusi Industri 4.0.

Dengan keunggulan dan peluang ini, BUMDes BIMA diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pemerataan ekonomi desa.

Kajian oleh (Arham, 2023) Disebut “Penelitian ini meneliti potensi pengelolaan desa sebagai cara Dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan asli desa, optimalisasi peran BUMDes di Desa Tokkonan menjadi langkah strategis yang diambil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan informan dari perangkat desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peran BUMDes perlu dimaksimalkan guna mendorong peningkatan PADes di Desa Tokkonan masih menjadi fokus pengembangan. Karena itu, pemerintah desa harus mengambil tindakan strategis untuk memanfaatkan potensi yang ada. Konsep Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri dari empat langkah utama: Penyadaran, Pelatihan, Pendampingan, dan Evaluasi, dianggap sebagai metode yang tepat untuk mengembalikan fungsi BUMDes. Desa Tokkonan memiliki banyak potensi, termasuk pertanian, wisata religius, pendidikan, dan wisata alam. dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PADes. Namun, karena peran BUMDes yang belum memaksimalkannya, potensi tersebut belum dapat dikelola dengan cara yang paling efektif.

Kajian oleh (Irianto, 2022) Disebut “Penelitian ini dilakukan guna mendorong peran BUMDes agar lebih optimal dalam mendukung kemajuan desa, melalui pengelolaan budidaya ikan bandeng di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes secara umum telah berjalan cukup baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia serta penggunaannya yang belum maksimal. Kedua, jumlah serta kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas, Ketiga, keterbatasan modal usaha yang dimiliki BUMDes sehingga menyulitkan dalam pengembangan potensi desa serta perencanaan kegiatan di masa depan.

Kajian oleh (Syani, 2022) Berjudul “Optimalisasi pengelolaan Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, Dari temuan yang ada, terlihat bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Bulu belum sepenuhnya berjalan secara optimal, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, terhadap kesejahteraan masyarakat berada pada kategori "kurang baik" dengan capaian sebesar 56%. Sementara itu, pengaruh pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk dalam kategori "cukup signifikan" dengan persentase sebesar 59,2%.

Berdasarkan dari kajian pustaka di atas, sebagian besar penelitian berfokus pada optimalisasi BUMDes pada sektor tertentu seperti pariwisata, pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha tertentu, dan peningkatan PADes. Beberapa penelitian juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes, seperti manajemen, modal, dan partisipasi masyarakat. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menyelidiki bagaimana tata kelola BUMDes membantu memperkuat ekonomi lokal Dengan melihat berbagai aspek dari dalam dan luar organisasi yang turut berpengaruh, terutama di Desa Manjung, Kecamatan Panekan. Studi ini akan memeriksa baik faktor internal (misalnya, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan kepemimpinan) maupun faktor eksternal (misalnya, kebijakan pemerintah, situasi ekonomi, dan sosial budaya). yang mempengaruhi dinamika tata kelola BUMDes Manjung Makmur.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Governance

A. Pengertian Governance

Menurut United Nation Development Programme (UNDP), Governance merupakan proses pelaksanaan fungsi ekonomi, kewenangan politik, serta administrasi dalam pengelolaan urusan negara di berbagai tingkatan. Proses ini juga mencakup berbagai mekanisme yang digunakan untuk memperkuat kohesi sosial, integrasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. UNDP mengatakan bahwa warga negara dan kelompok menggunakan berbagai mekanisme, proses, hubungan, dan institusi untuk menyuarakan kepentingan mereka, memenuhi hak dan kewajiban mereka, dan menyelesaikan konflik.

Governance adalah konsep yang berkaitan dengan tata kelola urusan publik, termasuk pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi demi pembangunan masyarakat. Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2004:23), Istilah governance menggambarkan mekanisme penggunaan kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna mendorong kemajuan warga. Dengan kata lain, governance meliputi penggunaan kekuasaan negara secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.

B. Prinsip Governance

1. Partisipasi

Prinsip partisipasi memastikan bahwa setiap individu atau Setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, memberikan masukan, serta mempunyai peran dalam memengaruhi hasil keputusan, sehingga kebijakan yang dibuat lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi juga mengacu pada keterlibatan aktif berbagai pihak yang ikut andil dalam membuat keputusan, baik sektor swasta, masyarakat, maupun pemerintah.

2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip governance yang mengacu pada keterbukaan dalam penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan mudah untuk semua pihak yang terlibat. Prinsip ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga hasilnya dapat dipantau dan dievaluasi oleh publik. Dengan transparansi, pemerintah atau institusi memberikan jaminan bahwa tindakan yang dilakukan berada dalam kerangka hukum dan etika yang dapat di pertanggung jawabkan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang mengharuskan setiap pihak yang memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu atau lembaga harus dapat mempertanggung jawabkan hasil dari kebijakan

atau program yang dijalankan kepada masyarakat atau pihak yang berwenang.

4. Efisiensi dan efektivitas

Dua prinsip yang saling terkait dalam tata kelola yang baik. Efisiensi menggambarkan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya (seperti uang, waktu, dan tenaga) tanpa membuang-buang hasil. Konsep efisiensi berfokus pada bagaimana cara mencapai tujuan dengan biaya dan usaha yang minimal. Sementara itu, efektivitas lebih berfokus pada pencapaian tujuan atau Capaian yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. (Indriastuti, 2021).

2.2.2 Tata Kelola BUMDes

A. Pengertian Tata Kelola Bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas usaha yang dikelola secara kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat setempat, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. BUMDes dirancang untuk menggali serta memaksimalkan potensi lokal sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan warga desa. Tidak hanya berperan sebagai penggerak roda ekonomi desa, BUMDes juga memiliki fungsi ganda sebagai lembaga sosial dan lembaga bisnis. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga sosial, BUMDes turut berkontribusi bagi masyarakat dengan menyediakan beragam layanan yang bersifat sosial dan bermanfaat langsung bagi kesejahteraan warga (Dwi, 2024).

Merujuk pada Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, PADes meliputi beberapa sumber, antara lain: 1) hasil usaha yang berasal dari desa itu sendiri; 2) pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya desa; 3) hasil swadaya serta kontribusi masyarakat; 4) pendapatan dari kerja sama; dan 5) pendapatan asli desa yang sah menurut ketentuan. Penjabaran dari pasal 107 ayat (1) menyatakan jika pemberdayaan yang bersumber pada sumber daya desa untuk mengembangkan sumber PAD yang dijalankan menggunakan cara pembentukan Bagian BUMDes mempunyai otoritas guna memberikan pinjaman serta bekerja sama dengan pihak ketiga. (Muhammad Azharuddin

Fikri, 2022). Berdasarkan Pasal 1 No 6 Permendagri, BUMDes adalah sebuah unit usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan dimiliki sekaligus dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat serta pemerintah desa. Pengertian BUMDes tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 (Sam, 2024).

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMDes

Panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007, menegaskan pentingnya penjabaran prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes supaya pemerintah desa, anggota modal, BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat bisa memahami secara sama. Pengelolaan BUMDes dilakukan berdasarkan enam prinsip utama, yaitu:

1. Kooperatif: Untuk memajukan dan mempertahankan usaha BUMDes, setiap anggota harus dapat bekerja sama dengan baik.
2. Partisipatif: Para anggota BUMDes diharapkan bisa secara sukarela atau ketika diminta memberikan bantuan dan kontribusi demi kemajuan usaha bersama.
3. Emansipatif, yakni mempunyai pengertian setiap anggota BUMDesa harus dilayani secara adil tanpa memandang agama, suku, atau golongan mereka.
4. Transparan: Berarti bahwa semua orang dalam masyarakat harus dapat dengan mudah mengetahui tindakan yang berdampak pada kepentingan umum.
5. Akuntabel: Setiap kegiatan bisnis perlu dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.
6. Ketahanan atau keberlanjutan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengembangkan dan melestarikan bisnis dalam BUMDes (Tasia, 2023).

Secara keseluruhan, keenam prinsip ini dirancang untuk memastikan pengelolaan BUMDes berlangsung dengan cara yang inklusif, adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan usaha di tingkat

desa, dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat. Konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip ini akan memungkinkan BUMDes memenuhi perannya sebagai penggerak ekonomi desa yang efektif, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi.

Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting lebih dari sekadar untuk mencapai keberhasilan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun dasar yang kokoh bagi keberlanjutan dan kemandirian desa dalam jangka panjang. Melalui pengelolaan BUMDes yang inklusif, adil, transparan, dan berkelanjutan, pemerintah desa dan masyarakat dapat bersinergi dalam membangun desa yang sejahtera, mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi di berbagai sektor. Pada akhirnya, BUMDes yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ini akan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, memaksimalkan potensi desa, dan membuka peluang baru yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa yang kuat secara ekonomi dan sosial akan lebih siap menghadapi tantangan global, sementara BUMDes akan berperan sebagai agen perubahan yang membawa kesejahteraan Berlangsung terus-menerus demi kepentingan generasi saat ini dan masa depan (Salihin, 2021).

C. Tujuan BUMDes

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur secara jelas dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan-peraturan tersebut menetapkan tujuan dari BUMDes atau BUMDes Bersama, yaitu:

1. Melaksanakan aktivitas usaha ekonomi dengan mengelola bisnis, mengembangkan investasi, meningkatkan produktivitas, serta memanfaatkan potensi desa melalui pengembangan usaha.
2. Memberikan layanan publik dengan menyediakan beragam produk dan jasa, memenuhi kebutuhan warga desa, serta mengelola lumbung pangan yang ada di desa.

3. Meningkatkan PADes dengan cara mengoptimalkan laba bersih dan penggunaan sumber daya ekonomi milik masyarakat desa.
4. Menciptakan nilai tambahan dengan menggunakan aset Desa
5. Menciptakan lingkungan ekonomi digital di desa (Suryo Wibowo & Sulistya Hapsari, 2022).

Secara keseluruhan, BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengintegrasikan pengelolaan usaha ekonomi, pelayanan publik, pemanfaatan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes juga berperan sebagai pendorong utama dalam mendorong anggota masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal, sehingga tercipta pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan implementasi yang tepat, BUMDes dapat mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi, sejahtera, dan berkelanjutan. Selain itu, BUMDes memungkinkan desa untuk mengembangkan inovasi lokal dan memperluas pasar produk unggulan mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel dari BUMDes juga berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memperbaiki tata kelola yang lebih baik (I Putu Satya Guna Dharma, 2022).

D. Tahapan Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes yang efektif harus didasarkan pada manajemen modal atau aset yang optimal untuk menghasilkan keuntungan. Baik manfaat langsung maupun tidak secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan warga secara keseluruhan. Untuk membangun BUMDes, berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan::

1. Tahap Pertama perencanaan

Tahap awal yang perlu dilakukan adalah pembentukan BUMDes, yang meliputi pendirian organisasi, pemilihan jenis usaha, serta penyusunan kerangka kerja usaha. Ketiga aspek tersebut harus dirancang secara matang agar badan usaha dapat terbentuk dengan baik dan mengalami perkembangan yang berkelanjutan.

2. Tahap Kedua Pengamatan

Setelah melakukan perencanaan, pemerintah desa perlu melakukan pengamatan terhadap potensi dan aset desa yang bisa dimanfaatkan untuk usaha BUMDes. Pada tahap observasi ini, pemahaman mendalam mengenai peluang pengembangan usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes sangatlah penting.

3. Tahap Ketiga Penataan dan Seleksi

Setelah tahap observasi selesai dan data yang relevan untuk pengembangan usaha BUMDes telah diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan penataan. Tahap ini sangat krusial karena selama observasi seringkali ditemukan beberapa jenis usaha, sehingga diperlukan proses seleksi dan pengaturan yang tepat untuk menentukan usaha mana yang memiliki potensi terbesar dan layak dijadikan usaha utama

4. Tahap Keempat pemeliharaan

Sangat penting bahwa BUMDes yang sudah berjalan dipelihara dengan baik karena dana desa yang menggerakkannya harus dipantau dan diberikan manfaat sesuai peruntukannya. Pemeliharaan ini mencakup pemeliharaan umum untuk keamanan bisnis, penyisihan keuntungan untuk mengantisipasi penyusutan peralatan, dan memperhatikan perubahan teknologi.

5. Tahap Kelima Pelaporan

Semua bisnis harus memiliki laporan bisnis, Untuk dijadikan alat ukur yang dipakai untuk menilai keberhasilan mereka. Pelaporan harus menyeluruh dan jelas tentang bagaimana masyarakat desa dinilai dan bertanggung jawab.

Dalam pengelolaan BUMDes, diperlukan tahapan-tahapan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan bahwa bisnis dilakukan dengan cara yang paling menguntungkan desa dan masyarakat. Mulai dari perencanaan hingga pelaporan, setiap tahapan memiliki peran penting dalam membangun dasar yang kuat dan mendukung keberlanjutan usaha BUMDes. Tahap pertama, yaitu perencanaan, merupakan dasar dalam

pembentukan BUMDes. Proses ini melibatkan pembentukan organisasi, pemilihan jenis usaha, serta pengembangan kerangka kerja usaha yang matang. Perencanaan yang baik akan memastikan arah usaha yang jelas dan siap untuk dilaksanakan.

Selanjutnya, tahap observasi dilakukan untuk menemukan potensi dan aset desa yang dapat digunakan untuk BUMDes. Pemerintah desa perlu memahami potensi lokal dan peluang bisnis yang dapat membantu pengembangan. Tahap penataan dan seleksi akan menentukan upaya yang paling berpotensi dengan data yang diperoleh dari hasil observasi. Pemilihan usaha yang tepat sangat penting agar BUMDes memiliki fokus yang jelas pada usaha yang paling prospektif.

Tahap pemeliharaan adalah langkah penting untuk memastikan usaha BUMDes tetap berjalan dengan baik. Ini mencakup pengelolaan dana, alokasi keuntungan untuk pengembangan, dan pembaruan teknologi yang diperlukan. Dengan pemeliharaan yang baik, usaha dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Tahap terakhir, yaitu pelaporan, bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan usaha BUMDes. Laporan yang jelas dan dapat diandalkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat desa dan memastikan bahwa pengelolaan BUMDes menjadi lebih akuntabel. Secara keseluruhan, kelima tahapan ini saling melengkapi dalam proses pembangunan dan pengelolaan BUMDes. Jika diterapkan dengan baik, BUMDes akan menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pendapatan desa serta kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa yang terkelola secara optimal (Febriyanti, 2024).

2.2.3 Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

A. Pengertian Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan perekonomian adalah proses perubahan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik dan maju dibandingkan sebelumnya. Hal ini melibatkan berbagai usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli, dan standar hidup secara keseluruhan. Bukan hanya dilihat dari angka atau data statistik, peningkatan ekonomi juga mencakup perbaikan kualitas hidup, seperti akses yang lebih mudah ke pendidikan, layanan

kesehatan, serta peluang kerja yang lebih luas. Secara umum, peningkatan perekonomian mencerminkan kemampuan suatu wilayah atau negara dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih kokoh, berkelanjutan, dan kompetitif. Proses ini melibatkan pengelolaan sumber daya secara optimal, penerapan teknologi baru, peningkatan produktivitas, serta pengembangan sektor-sektor penting seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa (Nursyamsiah & Qomaruddin, 2021).

Menurut (Munir, 2007) Kolaborasi pemerintah daerah dan warga dalam membuka kesempatan ekonomi yang sejalan dengan kapasitas sumber daya manusia dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan alam setempat, serta menumbuhkan industri dan kegiatan usaha lokal dikenal sebagai pengembangan ekonomi lokal.

B. Tujuan Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan setiap orang, baik secara individu maupun kelompok, adalah tujuan utama peningkatan perekonomian warga. Meningkatkan pendapatan masyarakat adalah salah satu cara agar orang dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Perputaran ekonomi lokal dan nasional akan secara langsung didorong oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan peluang kerja. Ketika ekonomi tumbuh, usaha kecil hingga besar akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan memberikan masyarakat penghasilan yang lebih stabil, sehingga kualitas hidup mereka juga semakin baik. Dalam jangka panjang, tujuan lainnya adalah mengurangi kesenjangan sosial. Dengan pemerataan ekonomi, semua kelompok masyarakat, termasuk yang kurang mampu atau rentan, seperti perempuan dan kaum muda, dapat berpartisipasi dan merasakan manfaatnya. Ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih adil, damai, dan saling mendukung.

Peningkatan ekonomi masyarakat juga bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah Dengan mengoptimalkan potensi sumber

daya daerah, termasuk sumber daya alam dan tenaga manusia, masyarakat bisa menciptakan produk atau jasa bernilai tinggi. Ini tidak hanya meningkatkan penghasilan tetapi juga menjadikan ekonomi lokal lebih kompetitif di tingkat nasional bahkan internasional. Selain itu, keberlanjutan juga menjadi salah satu tujuan penting. Masyarakat didorong untuk mengembangkan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sekarang tetapi juga ramah lingkungan, sehingga sumber daya tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Tujuan peningkatan ekonomi masyarakat adalah menciptakan kehidupan yang lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap orang punya kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi, sambil tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

